

Abstrak

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah berupa kekayaan alam, flora, dan fauna. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam di sektor kepariwisataan mengembangkan pariwisata dengan konsep pariwisata halal, konsep pariwisata halal sebagai salah satu strategi yang dilakukan dalam mengembangkan pariwisata NTB khususnya pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer yaitu wawancara dengan pelaku pariwisata halal yang terkait seperti Dinas pariwisata NTB, pihak swasta, masyarakat setempat serta data sekunder berupa statistik dan informasi dari internet. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengelolaan konsep pariwisata halal dengan melibatkan para stakeholder, penelitian ini dapat ditinjau dari perspektif *Collaborative Governance* dengan menggunakan konsep dari Ansell dan Gash. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini, Dispar NTB dan para stakeholder telah melakukan beberapa proses dalam menjalankan pariwisata halal di Lombok. *Starting condition* dalam hal ini Pemerintah daerah memberikan suatu gagasan awal terkait pariwisata halal dan direspon oleh para stakeholder. Kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini pemerintah daerah mencoba memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari program pariwisata halal kepada para stakeholder, *Desain institusional* dalam hal ini pemerintah daerah atau Dispar NTB menggunakan dasar kebijakan perda no 2 tahun 2016 sebagai acuan dalam program pariwisata halal, Proses kolaborasi dalam hal ini Dinas pariwisata NTB melakukan pertemuan dengan para stakeholder untuk membahas mengenai implementasi dari perda no 2 tahun 2016 terkait dengan pariwisata halal. Adapun saran pada penelitian ini 1) Memperjelas aturan dasar yang digunakan dalam proses kolaborasi agar bisa diterapkan pada kondisi pariwisata halal yang ideal. 2) Meningkatkan koordinasi dengan para stakeholder agar program pariwisata halal berjalan dengan maksimal. 3) Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan koordinasi dengan melibatkan pihak aparat keamanan dalam menjaga kenyamanan wisatawan. 4) Pemerintah Daerah dan para stakeholder yang menjalankan pariwisata halal diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Dinas kebersihan akan memberikan fasilitas terkait dengan kebersihan yang ada di obyek wisata.

Kata kunci : Pariwisata Halal, Stakeholder

ABSTRACT

The development in tourism sector is one of the efforts in regional potential development and utilization such as natural resources, plants, and animals. Nusa Tenggara Barat (NTB) as one of the regions having natural resources in tourism sector develops its tourism in halal tourism concept. Halal tourism concept is one of strategies taken in developing the tourism in NTB, particularly in Lombok. This research used descriptive qualitative method with primary data that is interview with the doers of the related halal tourism like the Department of Tourism of NTB, private parties, and the local communities. Meanwhile, the secondary data were statistics and information gathered from the internet. This research aims to explain about the management of halal tourism concept involving the stakeholders. This research can be seen from Collaborative Governance applying the concept of Ansell and Gash. The research results show that the government, in this case the Department of Tourism and the stakeholders, have conducted some process in implementing halal tourism in Lombok. Starting condition means that the Regional Department gives an initial recommendation regarding halal tourism and is responded by the stakeholders. The institutional design in this case the Regional Government or the Department of Tourism of NTB apply the policy of Local Regulation (Perda) No.2 Year 2016 as the guideline in halal tourism program. The collaboration process, in this case the Department of Tourism of NTB, holds meetings with the stakeholders to discuss about the implementation of Local Regulation (Perda) No.2 Year 2016 regarding halal tourism. Meanwhile, some recommendations for this research are: 1) Clarifying basic rules applied in the collaboration process so that it can be implemented in the ideal halal tourism conditions. 2) Increasing coordination with the stakeholders so that halal tourism program can run at maximum. 3) Regional Government is expected to improve the coordination by involving the security forces in maintaining the tourists' comfort. 4) Regional Government and the stakeholders running halal tourism are expected to improve the coordination with the Department of Sanitary that will provide facilities related to the sanitary existing in the tourism objects.

Keywords: Halal Tourism, Stakeholder